

LAPORAN PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN: FUNDAMENTAL
AREA PENELITIAN: DASAR



Implementasi Pendidikan Inklusif Di Tangerang Selatan

Oleh:

Muhammad Husni Arifin
FHISIP/Sosiologi
Universitas Terbuka

Bambang Prasetyo
FHISIP/Sosiologi
Universitas Terbuka

Sudirah
FHISIP/Sosiologi
Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

2017

HALAMAN PENGESAHAN
Laporan Penelitian
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA

1	a	Judul Penelitian	Implementasi Pendidikan Inklusif di Tangerang Selatan
	b	Skema Penelitian	Fundamental
	c	Area Penelitian	Dasar
2		Ketua Peneliti:	
	a	Nama Lengkap dan gelar	Muhammad Husni Arifin, PhD
	b	NIP/NIDN	197708282005011002/0028087708
	c	Golongan Kepangkatan	III/c Lektor
	d	Jabatan Akademik	Lektor
	e	Fakultas	FISIP
	f	Unit Kerja	FISIP
	g	Program Studi	Sosiologi
3		Anggota Peneliti:	
	a	Jumlah	2
	b	Nama Anggota 1	Hendrikus Ivoni Bambang Prasetyo, S.Sos, M.Si
	c	NIP/NIDN	197310231999031001/0023107301
	d	Fakultas	FISIP
	e	Program Studi	Sosiologi
	f	Unit Kerja	FISIP
	g	Nama Anggota 2	Dr. Sudirah, M.Si
	h	NIP/NIDN	195902011987031002/0001025901
	i	Fakultas	FISIP
	j	Program Studi	Sosiologi
	k	Unit Kerja	FISIP
4	a	Tahun Penelitian	2016
	b	Lama Penelitian	1 tahun
5		Biaya Penelitian	
	a	Diusulkan	Rp 46,592,000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
	b	Disetujui	
6		Sumber Biaya	Universitas Terbuka
7		Pemanfaatan Hasil	
	a	Seminar	Nasional
	b	Jurnal	Nasional

Tangerang Selatan, 14 Desember 2017

Mengetahui,
Dekan FHISIP-UT,

Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D
NIP. 196407221988111001

Menyetujui,
Ketua LPPM,

Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed, Ph.D
NIP. 196102121986032001

Ketua Peneliti,

Muhammad Husni Arifin, Ph.D
NIP. 197708282005011002

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan,

Dr. Herman, MA
NIP. 195605251986031004

SURAT PERNYATAAN REVIEWER 1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Daryono, SH., MA., PhD

NIP : 196407221989031019

Jabatan : Reviewer 1

Telah menelaah laporan penelitian

Judul : Implementasi Pendidikan Inklusif di Tangerang Selatan

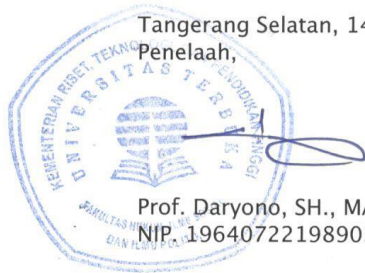
Peneliti : Muhammad Husni Arifin, Ph.D (Ketua), H. Bambang Prasetyo,
S.Sos, M.Si (Anggota 1), dan Dr. Sudirah, M.Si (Anggota 2)

Menyatakan bahwa laporan tersebut layak diterima sebagai laporan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tangerang Selatan, 14 Desember 2017

Penelaah,



Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D
NIP. 196407221989031019

A. Pendahuluan

1. Latarbelakang Masalah

Pendidikan inklusif merupakan perwujudan dari pendidikan untuk semua (*education for all*) yang telah menjadi gerakan global di seluruh dunia. Gerakan global ini semakin mendapat momentum ketika berbagai perwakilan Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional mendeklarasikan 'Salamanca Statement' pada tahun 1994 yang salah satunya mendorong munculnya berbagai inisiatif dan kebijakan tentang pendidikan inklusif di seluruh dunia.

Pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Zakia, 2015).

Di Indonesia, gerakan pendidikan inklusif sesungguhnya telah bersemi dan terus tumbuh, bahkan pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian serius terhadap pendidikan inklusif melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana dalam penjelasan terhadap pasal 15 (UU No. 20 Th 2003) menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 yang secara tegas mengatur berbagai aspek dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Dalam pasal 4 ayat 1 Permen ini misalnya diatur bahwa pemerintah kabupaten / kota harus menunjuk paling tidak satu sekolah inklusif pada tiap-tiap kecamatan, baik pada tingkat dasar dan menengah. Pasal-pasal lain dalam Permen ini seperti pasal 6 sampai 10 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin tersedianya sumber daya, termasuk guru pendamping khusus pada masing-masing sekolah inklusif.

Sejak diterbitkannya UU No. 20 tahun 2003, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia telah mengalami peningkatan secara kuantitas. Data pada tahun 2013,

menunjukkan jumlah sekolah inklusi pada tingkat SD/MI dan SMP/SMA/SMK meningkat menjadi sekitar 2.100 sekolah Inklusi di seluruh Indonesia (SD, SMP, SMA, dan SMK). Hal ini menunjukkan respon positif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia (Zakia, 2015).

Meskipun jumlah sekolah inklusi di berbagai kota di Indonesia meningkat namun implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih jauh dari level ideal. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif sejauh ini masih belum mampu menjawab kebutuhan terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan inklusif meliputi pengembangan kurikulum inklusif, kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran dalam setting inklusif, dan manajemen lembaga pendidikan yang berbasis inklusif. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusif juga menjadi masalah besar di sekolah-sekolah inklusif, antara lain kurangnya ketersediaan media belajar, infrastruktur, serta berbagai fasilitas sekolah yang aksesibel.

Berdasarkan latarbelakang ini, kegiatan penelitian berupaya menjelaskan implementasi pendidikan inklusif di sekolah-sekolah inklusi pada tingkat sekolah dasar di wilayah kota Tangerang Selatan.

2. Permasalahan

Pembelajaran di sekolah inklusi memiliki perbedaan dengan sekolah reguler pada umumnya. Sekolah inklusi harus mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus, baik dalam aspek kemampuan, bakat, dan minat anak. Modifikasi (penyesuaian) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

Secara umum, mutu pendidikan inklusif dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan proses pembelajaran. Faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan (Majid 2008: 06). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru terhadap model pembelajaran inklusif sangat perlu diperhatikan.

Selain masalah kurikulum dan kualifikasi tenaga pendidik (guru), pelaksanaan pendidikan inklusif juga menemui berbagai hambatan, seperti: a. Jumlah ABK di Indonesia masih sedikit yang terdaftar di sekolah; b. Kebijakan yang kurang mendukung; c. Kurangnya ketersediaan anggaran; d. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. Paradigma/Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Inklusi Pendidikan. Berbagai masalah ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan segenap warga Indonesia untuk mensukseskan sekolah inklusi di Indonesia.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latarbelakang dan permasalahan di atas maka penelitian ini dipandu dengan pertanyaan utama “Bagaimana implementasi pendidikan inklusif di wilayah Tangerang Selatan?” Selanjutnya, untuk memudahkan dalam proses penelitian maka pertanyaan utama ini dijabarkan ke dalam dua sub-pertanyaan, yakni

1. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah Tangerang Selatan?
2. Kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh sekolah-sekolah inklusi untuk menyelenggarakan pembelajaran inklusif?

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan praktis. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap kontribusi terhadap kajian-kajian ilmiah tentang pendidikan inklusif yang relatif sangat sedikit di Indonesia. Sementara itu, pada level praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong munculnya kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif bagi para stakeholder sekolah, warga dan para pengambil kebijakan di wilayah Tangerang Selatan.

B. Kajian Pustaka

Pendidikan inklusi telah disepakati oleh banyak negara untuk diimplementasikan dalam rangka memerangi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan. Implementasi pendidikan inklusi didasari oleh dokumen-dokumen internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi

para Penyandang Cacat tahun 1993, Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994.

Pendidikan inklusi menurut beberapa ahli mempunyai pengertian yang beragam, diantaranya:

- a. Tarmansyah (2009:75) mengatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama.
- b. Tarmansyah (2009:76) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas regular.
- c. L.K.M. Marentek (2007:145) mengemukakan pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah regular (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti berkelainan, lamban belajar (slow learner) maupun yang berkesulitan belajar lainnya.

Saat ini Indonesia memang belum memiliki data yang akurat dan spesifik tentang berapa banyak jumlah anak berkebutuhan khusus. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak berkebutuhan khusus yang berhasil didata ada sekitar 1,5 juta jiwa. Namun secara umum, PBB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10 persen anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak usia sekolah, yaitu 5 – 14 tahun, ada sebanyak 42,8 juta jiwa. Jika mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia ternyata cukup besar.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan pendidikan inklusi melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas–dinas pendidikan di provinsi, Kota/Kabupaten. Dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusi menemui berbagai kendala dan tantangan. Kendala tersebut yang sering dilaporkan adalah kesalahan pemahaman tentang konsep pendidikan inklusi, peraturan atau kebijakan yang tidak konsisten, sistem pendidikan yang tidak luwes dan sebagainya.

Pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagai berikut: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7–15 tahun”.

Undang-Undang di atas menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah harus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan untuk semua (education for all). Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana proses pendidikan yang ada di dalamnya kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus yang harus mendapat perlakuan sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Dalam perkembangannya pendidikan anak berkebutuhan khusus telah banyak mengalami perubahan yaitu pada awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat segregasi atau terpisah dari masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaan pendidikannya seperti sekolah SLB yang di dalamnya terdapat spesialisasi-spesialisasi terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan hambatanya seperti: SLB-A untuk sekolah anak tuna netra, SLB-B untuk sekolah anak tunarungu, SLB-C untuk sekolah anak tunagrahita, SLB-D untuk sekolah anak tunadaksa. Selanjutnya menuju pada pendidikan integratif, atau dikenal dengan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan anak luar biasa masuk ke sekolah reguler, namun masih terbatas pada anak-anak yang mampu mengikuti kurikulum di sekolah tersebut dan kemudian inklusi yaitu konsep pendidikan yang tidak membedakan keragaman karakteristik individu.

Selama ini anak berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kebutuhannya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok berkebutuhan khusus menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok berkebutuhan khusus. Sementara kelompok berkebutuhan khusus sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok berkebutuhan khusus dalam menyuatkan hak-haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh kelompok berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan.

Penyelenggaraan sistem sekolah inklusi merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun masyarakat inklusi. Sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagai realitas kehidupan. Banyak kasus yang muncul terkait pelaksanaan pendidikan inklusi, seperti minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan bahwa sistem pendidikan inklusi belum dipersiapkan dengan baik. Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus seharusnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan.

Penyelenggaraan sekolah inklusi memang tidak sesederhana menyelenggarakan sekolah umum. Kenyataan dilapangan dalam hal karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diterima belum sesuai dengan kebijakan, seperti dalam hal penerimaan jenis kekhususan, tingkat kecerdasan yang masih dibawah rata, belum ada penentuan batas jumlah siswa yang diterima, serta belum memiliki sarana prasarana khusus. Dukungan dari orangtua anak berkebutuhan khusus, orangtua siswa reguler, maupun masyarakat baru berupa dukungan moral. Padahal seharusnya dukungan yang dibutuhkan berupa dukungan material maupun keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah belum merata di semua daerah dan masih sangat terbatas, baik dalam bantuan teknis (keterlibatan dalam pelaksanaan: monitoring, pembimbingan maupun evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi) maupun bantuan non-teknis (dana maupun peralatan).

Adapun model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut (Ashman, 1994 dalam Emawati, 2008) : 1. Kelas Reguler (Inklusi Penuh) Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. 2. Kelas reguler dengan Cluster Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. 3. Kelas Reguler dengan Pull Out Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. 4. Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak norma di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. 5. Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler. 6. Kelas Khusus Penuh Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan bentuk upaya pemerintah yang diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Di beberapa kota di Indonesiapun sudah muncul sekolah inklusi yang pelaksanaannya atas kerjasama sekolah dan pemerintah kota. Akan tetapi pada kenyataannya masih sulit mewujudkan sekolah inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Salah satu bentuk kesulitan tersebut adalah masih adanya masyarakat yang belum menerima adanya siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, selain itu juga ketidakharmonisan antar berbagai pihak dalam pelaksanaan sekolah inklusi, seperti diperlukannya guru yang berkualitas dan pihak sekolah yang baiknya mendukung penuh pelaksanaan sekolah inklusi. Setiap pihak hendak bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan inklusi di Indonesia dalam usaha bersama mewujudkan gagasan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi masih perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya agar supaya di masa mendatang anak berkebutuhan khusus betul-betul mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya dan dapat menghormati realitas keberagaman dalam kehidupan di masyarakat secara maksimal.

Kesuksesan pelaksanaan pendidikan inklusi dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya faktor budaya, politik, sumber daya manusia (Kwon, 2005).

Keterlaksanaan pendidikan inklusi dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut index for inclusion (Ainscow, 2000). Indeks inklusi ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu (1) dimensi Budaya (creating inclusive cultures), (2) dimensi Kebijakan (producing inclusive policies), dan (3) dimensi Praktik (evolving inclusive practices). Setiap dimensi dibagi dalam dua seksi, yaitu: Dimensi budaya terdiri atas seksi membangun komunitas (building community) dan seksi membangun nilai-nilai inklusi (establishing inclusive values). Dimensi kebijakan terdiri atas seksi pengembangan tempat untuk semua (developing setting for all) dan seksi melaksanakan dukungan untuk keberagaman (organizing support for diversity). Sedangkan dimensi praktik terdiri atas seksi belajar dan bermain bersama (orchestrating play and learning) dan seksi mobilisasi sumber-sumber (mobilizing resources).

Meski sampai saat ini sekolah inklusi masih terus melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, namun dilihat dari sisi idealnya sekolah inklusi merupakan sekolah yang ideal baik bagi anak dengan dan tanpa berkebutuhan khusus. Lingkungan yang tercipta sangat mendukung terhadap anak dengan berkebutuhan khusus, mereka dapat belajar dari interaksi spontan teman-teman sebayanya terutama dari aspek sosial dan emosional. Sedangkan bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus memberi peluang kepada mereka untuk belajar berempati, bersikap membantu dan memiliki kepedulian. Disamping itu bukti lain yang ada mereka yang tanpa berkebutuhan khusus memiliki prestasi yang baik tanpa merasa terganggu sedikitpun.

C. Metodologi

1. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis studi kasus (*case study analysis*). Desain penelitian ini dipilih karena dianggap cocok untuk menggali secara mendalam faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah inklusi untuk menyelenggarakan pembelajaran inklusif.

Desain analisis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep studi kasus yang dikemukakan oleh Helen Simon (2009):

Case study is an in-depth exploration from multiple perspectives of the complexity and uniqueness of a particular project, policy, institutions,

programme or system in a ‘real life’ context. It is research-based, inclusive of different methods and is evidence-led. The primary purpose is to generate in-depth understanding of a specific topic (as in a thesis), programme, policy, institution or system to generate knowledge and/or inform policy development, professional practice and civil or community action (Simons, 2009, p. 21).

2. Partisipan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan partisipan penelitian (Creswell, 2007; Simons, 2009). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan inklusif sehingga diperlukan untuk melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah Tangerang Selatan, seperti pihak Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, para kepala sekolah dan guru di sekolah inklusi, dan para orang tua dari murid-murid yang berkebutuhan khusus.

Penelitian ini akan mefokuskan pada sekolah-sekolah inklusi di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, sekolah-sekolah inklusi yang dilibatkan dalam penelitian ini akan dipilih secara purposif berdasarkan representasi kecamatan di wilayah Tangerang Selatan, yakni Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Serpong, Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Pondok Aren.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara interaktif dengan analisis data. Data akan dikumpulkan melalui tiga tahap:

- a. Wawancara semi terstruktur dengan dinas pendidikan Tangerang Selatan
- b. Wawancara semi terstruktur dengan para orang tua
- c. Wawancara semi terstruktur dengan para kepala sekolah
- d. Diskusi kelompok terfokus dengan para guru sekolah inklusi

Pengumpulan data dalam penelitian dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Hubungan antara pertanyaan penelitian dan pengumpulan data

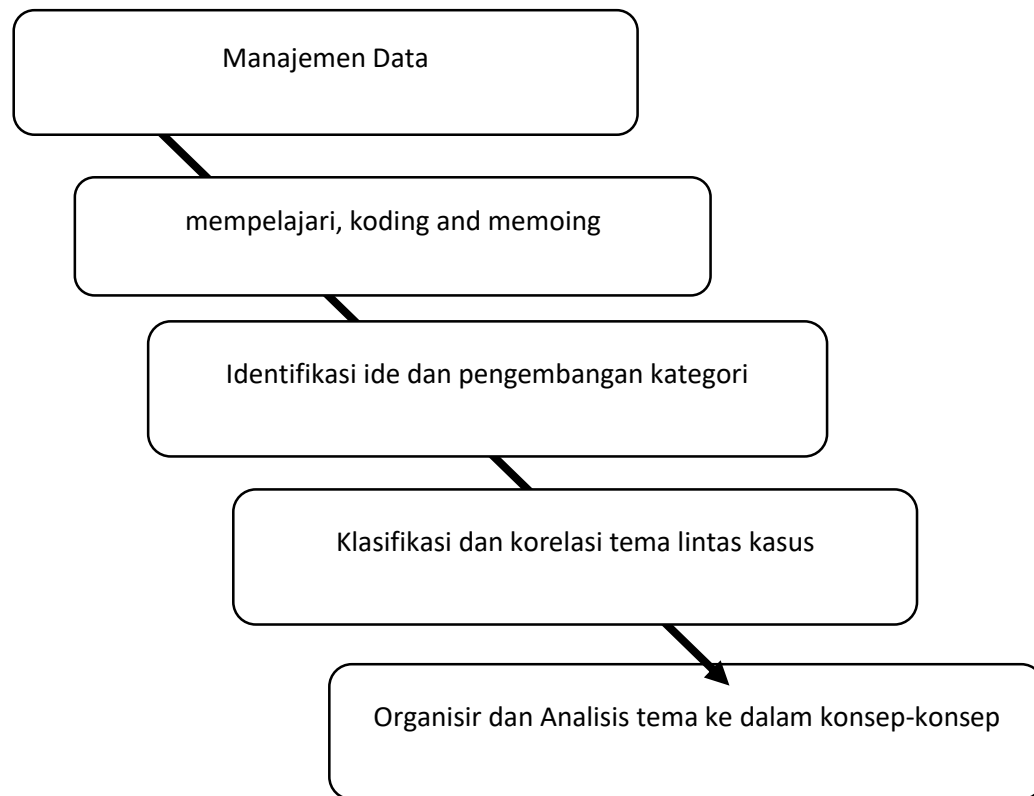
Pertanyaan Penelitian	Method	
	Metode Pengumpulan Data	Analisis Data
Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif	– Wawancara semi terstruktur dengan dinas pendidikan, kepala sekolah,	

	orang tua, dan guru – FGD dengan para guru sekolah inklusi – Data sekunder	Analisis induktif berdasarkan cross-referencing interviews and secondary data
Kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh sekolah inklusi	– Wawancara semi terstruktur dengan dinas pendidikan, kepala sekolah, orang tua, dan guru – FGD dengan para guru sekolah inklusi	

4. Metode Data Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni *single case analysis* dan *multiple case analysis*. Analisis kasus tunggal memfokuskan pada unit analisis secara terpisah secara mendalam meliputi segala aspek yang berhubungan dengan pendidikan inklusif di wilayah Tangerang Selatan. Sementara itu, analisis kasus gabungan (*multiple case analysis*) akan menganalisa berbagai fakta yang serupa dan berbeda dari beberapa kasus yang diteliti (Stake, 1995; Yin, 2003).

Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan (Auerbach & Silverstein, 2003; Creswell, 2007; Yin, 2003; Hatch, 2002), yakni: 1) Manajemen data. Data diorganisir ke dalam file dan folder serta menggunakan software NVIVO untuk membantu dalam mengolah dan menganalisis data. 2) Reading, coding, and memoing. Setelah mengorganisir data, analisis data dilanjutkan dengan membaca seluruh transkrip wawancara, membuat daftar koding yang terkait dengan fokus penelitian, dan memulai untuk menulis memo-memo tentang mengapa poin-poin wawancara dipilih. 3) mengidentifikasi ide-ide yang berpola dalam transkrip wawancara. Dalam tahap ini, analisis data dilakukan melalui *single case analysis* dan *cross-case analysis*. Tahap pertama dilakukan identifikasi ide-ide yang berpola dalam *single case analysis* yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok ide yang serupa. Selanjutnya pada tahap *cross-case analysis*, peneliti akan menganalisis hubungan diantara kelompok ide tersebut secara lintas kasus dan mengidentifikasi tema-tema yang relevan 4) Tahap selanjutnya adalah mengorganisir tema-tema yang memiliki kemiripan makna dan perbedaan. 5) Selanjutnya adalah menganalisis tema-tema yang teridentifikasi ke dalam konsep-konsep yang lebih abstrak.



Gambar 1. Proses Analisis Data

5. Etika Penelitian

Etika penelitian dalam studi ini dimulai dengan meminta kesediaan dan persetujuan dari para informan untuk terlibat dalam proses penelitian, menjamin kerahasiaan identitas informan, dan memberikan hak bagi informan untuk mengundurkan diri dari penelitian.

Semua nama informan yang digunakan dalam penelitian akan menggunakan nama samara (*pseudonyms*) dan semua data original yang terkat dengan penelitian akan disimpan dengan aman. Selain itu, peneliti juga akan menginformasikan kepada para informan bahwa data penelitian hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan seluruh partisipan dapat mengakses data penelitian dan memberikan tanggapan atau keberatan atau bahkan penghapusan terhadap berbagai aspek dalam data penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

Membahas implementasi pendidikan inklusif di Tangerang Selatan maka pembahasan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni potret sekolah, sumber daya pendukung, dan dukungan kebijakan dari pemerintah kota.

1. Pendidikan di Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan atau yang disebut dengan *Tangsel* berdiri pada tanggal 29 Oktober 2008 dengan dasar hukum UU No. 32 tahun 2007. Luas wilayah Kota Tangsel adalah 210,49 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1.303.569 dan kepadatan penduduk mencapai 4.589 per km². Wilayah Kota Tangsel meliputi tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Terkait dengan perbatasan wilayah, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan (DKI Jaya) dan Kota Depok (Jawa Barat), sebelah selatan berbatasan dengan kota Depok dan Kabupaten Bogor (Jawa Barat), sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang (DPRD Tangsel, 2017; Hidayat, 2017).

Ide dasar pembentukan Kota Tangerang Selatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan daerah secara otonom dan mandiri diharapkan dapat memperpendek hambatan birokrasi pemerintahan sehingga potensi daerah dan sumberdaya di Kota Tangsel dapat dikelola secara optimal. Dengan demikian, tingginya potensi daerah dan kualitas SDM yang ditopang oleh kemampuan mumpuni aparat pemerintahan diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi warga Kota Tangerang Selatan.

2. Potret Sekolah Inklusi di Tangerang Selatan

Satuan pendidikan (sekolah) di Tangerang Selatan dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK berjumlah total 817 sekolah dengan perincian untuk tingkat SD sederajat berjumlah 403, SMP sederajat berjumlah 233 sekolah, SMA sederajat berjumlah 101 sekolah, dan SMK berjumlah 80 sekolah.

Tabel 1. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) di Tangerang Selatan

No.	KECAMATAN	<u>SD</u> <u>Sederajat</u>			<u>SMP</u> <u>Sederajat</u>			<u>SMA</u> <u>Sederajat</u>			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	159	244	403	23	210	233	14	87	101	7	73	80	817
1	<u>Kec. Ciputat</u>	28	40	68	1	38	39	4	10	14	1	17	18	139
2	<u>Kec. Ciputat Timur</u>	19	22	41	4	16	20	2	7	9	1	15	16	86
3	<u>Kec. Pamulang</u>	28	53	81	6	44	50	2	17	19	0	11	11	161
4	<u>Kec. Pondok Aren</u>	35	61	96	3	47	50	1	20	21	1	14	15	182
5	<u>Kec. Serpong</u>	21	41	62	4	38	42	2	23	25	2	10	12	141
6	<u>Kec. Serpong Utara</u>	16	20	36	3	17	20	1	7	8	1	2	3	67
7	<u>Kec. Setu</u>	12	7	19	2	10	12	2	3	5	1	4	5	41

Sumber:

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=286300&level=2>

Cukup sulit untuk memperoleh data sekolah inklusi di Tangerang Selatan melalui pencarian online (daring). Data yang diperoleh melalui pencarian online (*googling*) hanya menampilkan data sekolah inklusi yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten. Meskipun demikian, hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim peneliti ternyata ada sekolah yang ditunjuk secara *top-down* dan tidak didukung oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai sekolah inklusi. Akibatnya, pada tahun ajaran 2017, sekolah tersebut tidak menerima anak berkebutuhan khusus lagi sebagai siswa.

Salah satu satuan pendidikan yang diteliti adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Cabe Ilir 3. Apabila kita mencari informasi sekolah-sekolah inklusi melalui internet maka SDN Cabe Ilir 3 akan muncul sebagai salah satu daftar sekolah inklusi di Kota Tangerang Selatan. Informasi ini mendorong masyarakat di sekitar Pondok Cabe yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk menyekolahkan anaknya di SDN Cabe Ilir 3. Namun, adanya informasi bahwa SDN Cabe Ilir 3 sebagai sekolah inklusi menimbulkan masalah sendiri bagi kepala sekolah dan para guru. Hal ini karena penetapan sebagai sekolah inklusi dilakukan secara *top down* tanpa memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendukung. Penetapan *top down* ternyata dilakukan oleh Dinas Provinsi Banten dan tidak ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Hasil wawancara, 2017).

Akibatnya, Kepala Sekolah dan para guru merasa terpaksa untuk menerima siswa baru yang berkebutuhan khusus karena mereka merasa tidak memiliki kompetensi khusus untuk mengajar anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2017, SDN Cabe Ilir 3 tidak menerima siswa berkebutuhan khusus karena tidak ada dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan (Hasil wawancara, 2017).

Sementara itu, kondisi di SDN Muncul 3 memiliki perbedaan dengan kondisi di SDN Cabe Ilir 3. SDN Muncul 3 juga dimasukkan sebagai daftar sekolah inklusi namun mereka berupaya untuk tetap menjadi sekolah inklusi dengan sumber daya yang mereka miliki.

3. Potret Guru Kelas di Sekolah Inklusi

Tidak adanya dukungan dari Dinas Pendidikan Tangerang Selatan terhadap kompetensi dan keterampilan guru yang memiliki siswa berkebutuhan khusus membuat proses pembelajaran di kelas didasarkan pada kemampuan guru semata. Ada beberapa guru yang lebih kreatif dengan mencari berbagai sumber pembelajaran tentang pendidikan inklusif ataupun mengikuti berbagai pelatihan pendidikan inklusif secara swadana. Namun sebagian besar, para guru kelas pasrah dengan ketiadaan dukungan dari Pemerintah dan mereka berupaya mengelola anak didik dengan semampu mereka. Sebagaimana salah satu guru mengatakan:

....semenjak saya mengajar di SD ini (SDN Cabe Ilir 3), saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Kota (Dinas Pendidikan) jadi saya mengajar berdasarkan kemampuan yang saya miliki dan alhamdulillah saya bisa mengurus anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

Kondisi semacam ini sangatlah memprihatinkan karena ketiadaan dukungan dari pemerintah tentu berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas. Sebagaimana dikatakan oleh Hrekow dan Barrow (1993) bahwa suatu pendidikan inklusif setidaknya memerlukan dukungan dari tiga pihak, yakni dukungan konselor, guru kelas, dan keluarga. Dukungan yang berbasis sekolah sangatlah dominan untuk perkembangan siswa berkebutuhan khusus, terutama dukungan dari para guru kelas (*in class teachers*)

Lebih lanjut, Thomas (1992) menyarankan supaya dibentuk tim pendukung pembelajaran inklusif di setiap sekolah sehingga akan terjadi kolaborasi diantara para guru kelas dalam meningkatkan pembelajaran. Tim guru kelas bisa dibuat lintas sekolah sehingga dapat terjadi kolaborasi lebih luas. Kolaborasi semacam ini bisa dilakukan seperti kolaborasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Apabila sudah terbentuk tim guru kelas maka menurut Thomas (1992) perlu memprioritaskan beberapa agenda, yakni:

- Pembahasan tentang pedagogi, profesionalitas, dan berbagai kebutuhan dan ekspektasi dari para anggota tim harus dilakukan di awal.
- Seluruh perencanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota tim
- Perlu ada identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh anggota tim
- Harus ada definisi yang jelas tentang tugas dan aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran inklusif
- Tim harus memiliki pertemuan reguler untuk mendiskusikan dan mengevaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

4. Kebijakan Inklusif

Implementasi pendidikan inklusif tidak akan berjalan optimal tanpa ada dukungan pemerintah. Bukti nyata adalah implementasi pendidikan inklusif di Tangerang Selatan yang tidak berjalan karena tidak ada dukungan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sebagai suatu pemerintahan, seharusnya Kota Tangerang Selatan memberikan perhatian terhadap implementasi pendidikan inklusif melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat inklusif.

Pendidikan inklusif adalah tentang hakikat pendidikan yang kita harapkan, suatu bentuk kemasyarakatan yang ingin kita miliki, dan manajemen relasi kuasa yang tidak subordinatif. Oleh karena itu, implementasi pendidikan inklusif di suatu daerah memerlukan suatu perubahan radikal, suatu perubahan yang harus melahirkan suatu revolusi kultural yang mengikis habis wacana hegemoni dalam relasi kuasa di masyarakat.

Kebijakan inklusif adalah bentuk gerakan sosial baru untuk merobohkan rezim tradisional mengenai kebenaran dan hierarki kekuasaan. Kebijakan inklusif adalah bentuk dekonstruksi kebijakan dengan mengidentifikasi ruang untuk aksi konter hegemoni (counter hegemonic actions) untuk mengubah tatanan pengetahuan yang ada dan memutus rantai struktur lama yang melekat dalam kerangka pikir tentang pendidikan berkebutuhan khusus (D'Alessio, 2011).

E. Kesimpulan dan Penutup

Implementasi pendidikan inklusif di Tangerang Selatan belum berjalan dengan optimal di mana Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memberikan perhatian terhadap pengembangan sekolah inklusi di Tangerang Selatan. Beberapa sekolah

inklusi berupaya secara mandiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran inklusif. Karena tidak ada dukungan sama sekali dari Pemerintah Kota, khususnya Dinas Pendidikan maka para guru kelas berupaya mengelola kelas sesuai kemampuan yang dimiliki. Berbagai kesulitan yang dihadapi ketika mengelola kelas inklusif dicarikan solusinya melalui konsultasi mandiri. Sehubungan dengan kondisi ini, pemerintah kota Tangerang Selatan harus memberikan perhatian terhadap implementasi pendidikan inklusif di wilayahnya dan harus memberikan kebijakan-kebijakan yang bersifat inklusif sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus mendapat hak pendidikan yang berkualitas setara dengan anak-anak Indonesia lainnya.

Daftar Pustaka

- Auerbach, C. F., & Silverstein, L. B. (2003). *Qualitative Data: an Introduction to Coding and Analysis*. New York and London: New York University Press.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. California: Sage Publications.
- D'Alessio, Simona. (2011). *Inclusive Education in Italy*. Rotterdam: Sense Publishers
- Hatch, J. A. (2002). *Doing qualitative research in education settings*. New York: State University of New York Press.
- Hrekow, P. and Barrow, G. (1993). Developing a System of Inclusive Education for Pupils with Behavioral Difficulties. *Pastoral Care*, June, 6 – 13.
- Simons, H. (2009). *Case Study Research in Practice*. London: SAGE Publications.
- Zakia, D. L. (2015). Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan “Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Juenal Bereputasi”. Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah. Surakarta: 21 November 2015 (ISBN: 978-979-3456-52-2).
- Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (3rd ed.). London: Sage Publications.
- Hidayat, A. F. (2017). Potensi Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Diunduh pada 21 Nopember 2017 dari laman https://www.kompasiana.com/atep_afia/potensi-kota-tangerang-selatan-tangsel_55004db7a33311376f510a4c.
- DPRD Kota Tangerang Selatan. (2017). Sejarah Tangerang Selatan. Diunduh pada 20 Nopember 2017 dari laman <http://dprd-tangselkota.go.id/sejarah-tangerang-selatan>.

Kemdikbud. (2017). Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Kabupaten/Kota: Kota Tangerang Selatan. Diunduh pada 14 Nopember 2017 dari laman <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=286300&level=2>

Thomas, G. (1992). *Effective Classroom Teamwork: Support or Intrusion?* London: Routledge.

Thomas, G., Walker, D., and Webb, Julie. (1998). *The Making of the Inclusive School*. London: Routledge

E. CV Tim Peneliti

1. Ketua Tim Peneliti

Personal Data

Name : Muhammad Husni Arifin, S. Ag., M.Si., Phd
(NIP. 197708282005011002)

Place/Date of Birth : Jombang, August 28, 1977

Nationality : Indonesia

Place of work : Universitas Terbuka

Position : Academic staff at Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Terbuka.

Office Address : Gedung FISIP Lt. 1, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang 15418. P.O. BOX 59/CPA, Ciputat 15401, Jakarta, Indonesia.

Home Address : Komplek Kedaung Hijau Blok A No. 10 Kedaung Pamulang 15415, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

Email : mhusni@ecampus.ut.ac.id

EDUCATION

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, United Kingdom.
PhD in Education, November 2015.

UNIVERSITY OF INDONESIA, Indonesia.

Masters in Sociology, January 2004.

State Islamic University “Syarif Hidayatullah” Jakarta, Indonesia

Bachelor in Islamic Law (S.Ag), January 2000.

RESEARCH EXPERIENCE

- A researcher in the project on ‘Social network impact on students’ academic achievement at the Indonesia Open University – Universitas Terbuka’ (2010).
- A researcher in the project on ‘Online academic supervision in distance education context’ (2009).
- A researcher in the project on ‘Research and development of multimedia based tutorial kit for Social Statistics’ (2007).
- A researcher in the project on ‘Students’ perception on the quality of learning guide for Social Statistics’ (2006).

TRAINING

- Writing an academic book review (University of Southampton, 13/03/2013)
- Writing skills for humanities, social, and human sciences (University of Southampton, 1/03/2013)
- Using word 2010 to write thesis for PC users part 3 – 5 (University of Southampton, 18, 21, 28/02/2013)
- NVIVO course – a qualitative data analysis (University of Southampton, 12–13/02/2013)
- SPSS – an quantitative data analysis (University of Southampton, 13–24/05/2012)
- Endnote bibliographic software: basic course(University of Southampton, 08/06/2012)
- Endnote bibliographic software: advance course(University of Southampton, 12/06/2012)

INTERNATIONAL CONFERENCE

- A presenter in ICERI 2016 conference in Seville, Spain, with the conference paper “Understanding Self-motivation in contributing to student persistence in the Indonesia Open University”,
- A presenter in the AAOU 2016 Conference in Manila, Philippines, with the conference paper: Understanding the role of student support services toward student persistence in the Indonesia Open University
- A presenter in the International Conference on Distance Learning and Education (ICDLE) in Geneva, Switzerland, October 8–9, 2014, with the conference paper title ‘exploring factors in contributing student progress in the Open University’.

JOURNAL REVIEWER

A reviewer of Open Praxis Journal, 2014 volume 6 and 2015 volume 7. Open Praxis is published by the International Council for Open and Distance Education (ICDE).

PUBLICATIONS

- **Arifin, M.H.** (2016) ‘Exploring factors in contributing student progress in the Open University’, *International Journal of Information and Educational Technology* (IJJET), vol 6 (1), pp. 29 – 34. DOI: 10.7763/IJET.2016.V6.653.
- **Arifin, M.H.**, Budiwati, Y., Daryono (2009) ‘Model pembimbingan akademik online bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka’ (Model of online academic supervision for students of Faculty of Social and Political Sciences at the Indonesia Open University), *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh* (PTJJ), Vol. 10 (2).
- **Arifin, M.H.**, Prasetyo, B., Budiwati, Y. (2008) ‘Sosiologi Pendidikan’ (Sociology of Education), Jakarta: Universitas Terbuka.
- **Arifin, M.H.**, Prasetyo, B., Febriana, E. (2010) ‘Pengantar Statistik Sosial’ (Introductory for Social Statistics), Jakarta: Universitas Terbuka.